

**URGENSI PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI  
SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA  
(Studi di Pengadilan Negeri Makassar)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**RAHMAT BUNYADRI**

**NIM:10300110024**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Bunyadi  
NIM : 10300110024  
Tempat/tgl. Lahir : Merauke/ 13 Februari 1991  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Mannuruki Raya No. 25 Makassar  
Judul : Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Desember, 2015

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**Rahmat Bunyadi**  
**NIM: 10300110024**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata .....	13
B. Tinjauan Umum mengenai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata .....	39
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemeriksaan Setempat sebagai alat Bukti Sengketa Tanah .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Sumber Data .....	66
D. Metode Pengumpulan Data .....	67
E. Instrumen Penelitian .....	68
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	69
G. Pengujian Keabsahan Data .....	71

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Makassar.....	72
B. Kesulitan yang dialami Hakim dalam Pemeriksaan Setempat.....	81
C. Upaya Hakim dalam Menangani Kesulitan-kesulitan Pemeriksaan Setempat .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## KATA PENGANTAR



Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, demikian juga para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah swt. yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Bunyamin dan Ibunda Hj. Adriana, semoga Allah swt. melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada keduanya. Sebagaimana keduanya telah mendidik semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh Wakil Rektor.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh Wakil Dekan.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, M.HI selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
5. Bapak Dr. Abdul Rahman Kanang, M. Pd dan Dra. Nila Sastrawati, M. Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.
7. Kepala Perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kemudahan saat melakukan penelitian di Instansi tersebut.
9. Saudara-saudara seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) angkatan 2010 terima kasih atas kebersamaanya kurang lebih 5 tahun.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb*

Makassar, 28 Desember, 2015

Penyusun,

Rahmat Bunyadri

NIM: 10300110024

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...   ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> a u y a	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>y</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah</i> dan <i>w</i> u	u	u dan garis di atas

Contoh:

: *mata*

: *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

: *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

: *al-falsafah*

: *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: : *ta'muru>na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *dinullah* *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

أَهِمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahrul Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>

(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

UIN = Universitas Islam Negeri

HPK = Hukum Pidana Ketatanegaraan

UU = Undang-Undang

RUU = Rancangan Undang-undang

HKI = Hak Kekayaan Intelektual

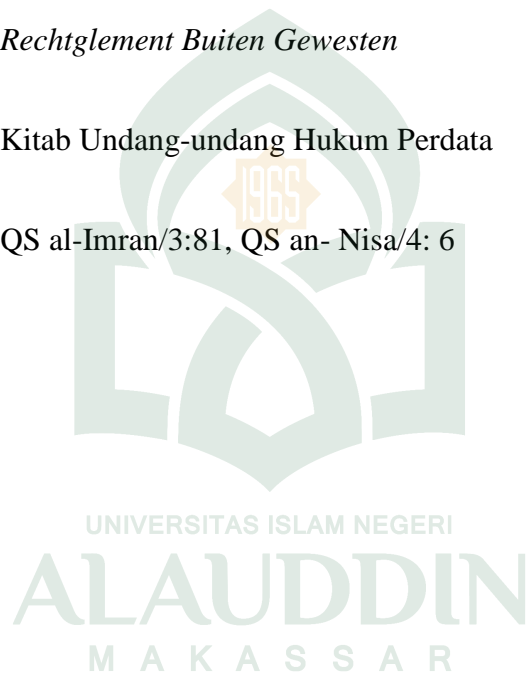
RI = Republik Indonesia

HAM = Hak Asasi Manusia

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

Pdt	= Perdata
PTUN	= Pengadilan Tata Usaha Negara
MA	= Mahkamah Agung
APS	= Alternatif Penyelesaian Sengketa
HIR	= <i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i>
RBG	= <i>Rechtglement Buiten Gewesten</i>
KUHPerdata	= Kitab Undang-undang Hukum Perdata
QS.../.....	= QS al-Imran/3:81, QS an- Nisa/4: 6



## **ABSTRAK**

Nama : Rahmad Bunyadri  
Nim : 10300110024  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Judul : Urgensi Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Makassar)

---

Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1) bagaimana urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap sengketa tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makassar, 2) kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat, 3) bagaimana upaya hakim dalam menangani atau menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut.

Penyelesaian masalah tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Pengadilan Negeri Makassar untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Makassar.

Dari hasil penelitian secara konseptual, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yang di tempat letak objek barang di sengkatakan. Kesulitan yang di hadapi hakim dalam pemeriksaan setempat diantaranya, masalah personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, tanpa melibatkan saksi ahli, masalah keamanan, dan sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara. Upaya yang dilakukan hakim dalam menangani kesulitan dalam pemeriksaan setempat adalah dengan mencari riwayat tanah pada dasarnya surat keterangan riwayat tanah merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan hukum antara penggarap dengan tanah yang di garapnya, dengan beda kasus memanggil pemilik awal dari tanah yang di sengkatakan dan memanggil pemilik akhir yang membeli tanah, dan memeriksa proses kepemilikan dengan melihat sertifikat tanah yang dimiliki pemiliknya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemeriksaan setempat sebagai alat bukti Sengketa tanah dalam hukum acara perdata maka hakim telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diharapkan. Dengan memeriksa perkara yang bersangkutan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu perkara diajukan ke pengadilan tidak lain untuk mendapatkan penyelesaian secara *Due Process of law*<sup>1</sup> dan pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (*justiciabellen*).

Tidak bisa kita pungkiri, terkait dalam hal penegakan hukum di negeri ini, tidak hanya Jaksa, Pengacara, atau bahkan hakim pun masih banyak yang terkungkung dengan cara berpikir yang legal - positivistik.<sup>2</sup> yang berimplikasi pada pengaplikasian hukum yang kaku dan tidak objektif. Adakalanya hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat, membutuhkan kepastian dan keyakinan baik untuk melihat dengan mata kepala sendiri keadaan yang menjadi dasar perselisihan antara kedua belah pihak secara berimbang. Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan.<sup>3</sup> Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Yang dimaksud disini adalah segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

<sup>2</sup>Yang dimaksud disini mengenai prosesi pemaknaan yang hanya terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperdulikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satunya adalah yang tercermin dari doktrin bahwa "Hukum Acara Perdata merupakan hukum untuk mencari kebenaran formil". Yang berimplikasi pada pengaplikasian hukum yang kaku dan tidak objektif.

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1999), h. 150.

disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya menjadi semakin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.<sup>4</sup>

Hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang selanjutnya disingkat dengan HIR dan *Rechtglement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat dengan RBG. Sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Sebelum hakim menentukan dan mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 498

yang sebenarnya. Untuk itu, hakim tidak dapat menerima apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak saja, tetapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut bahwa “Siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya. Begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya”.<sup>5</sup> Inilah yang biasa disebut dengan beban pembuktian (*Bewijlast Leer*) yang ditemui dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Begitu pula Pasal 283 RBG 1865 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”<sup>6</sup>

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, akan tetapi apabila hakim mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh melalui

---

<sup>5</sup>R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeia, 1995), h. 119.

<sup>6</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1865.

proses pembuktian ini dan untuk dapat menjatuhkan putusannya yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya.<sup>7</sup>

Hukum acara perdata mengenal bermacam-macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR<sup>8</sup> dan pasal 1866 KUHPerdata<sup>9</sup>, yaitu: (1) Bukti surat, (2). Bukti saksi, (3). Persangkaan, (4). Pengakuan, (5). Sumpah.

Adapun sistem pembuktian dalam perkara perdata, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap<sup>10</sup> ke dalam fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil.
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sikap pasif hakim, sekiranya hakim harus yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi apabila penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 132.

<sup>8</sup>Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, Pasal 164.

<sup>9</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866.

menyingkirkan keyakinan ini, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan<sup>11</sup>.

Tugas hakim adalah menerapkan hukum atau undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Disini hakim harus benar-benar memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni.<sup>12</sup> Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara.

Tidak jarang dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.499

<sup>12</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Cet. III, Bandung: Bina Cipta, 1989), h. 79.

kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, ada kalanya hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu bertentangan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tanah misalnya, seringkali ditemukan perbedaan mengenal fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah pelik karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil sudah seharusnya apabila hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*).<sup>13</sup>

Menurut Pasal 153 HIR “bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera

---

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 779.

pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim.”<sup>14</sup>

Hal menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Namun pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesulitan-kesulitan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar pengadilan. Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang

---

<sup>14</sup>Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh Karjadi, pasal 153.

sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat adalah merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul: “Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Terhadap Perkara Tanah Dalam Hukum Acara”.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan focus penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat.

### **2. Deskripsi fokus.**

Demi menghindari kesalahpahaman dalam memahami uraian dalam memahami skripsi ini, maka dipaparkan pengertian beberapa terminologi yang dianggap penting, antara lain :

- a. Hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-caranya memelihara dan mempertahankan hukum perdata

---

<sup>15</sup>Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UMSurabaya, 2007), h. 149.



materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara perdata.<sup>16</sup>

- b. Pembuktian adalah suatu jalan guna mendapatkan suatu keputusan akhir yang mana didalam pembuktian tersebut terdapat fakta-fakta yang dibutuhkan oleh hakim. Dengan demikian, maka tentang hukumnya perlu diberitahukan kepada hakim oleh para pihak, dan tidak perlu pula untuk dibuktikan karena hakim dianggap tahu akan hukumnya.<sup>17</sup>
- c. Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.<sup>18</sup>
- d. Pemeriksaan setempat atau descente menurut Sudikno Mertokusumo ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan atau diluar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>19</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>16</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.167.

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h.

<sup>18</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, h.28.

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h. 142.

Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap perkara tanah dan yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan 3 sub masalah yakni:

1. Bagaimana urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap sengketa tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat?
3. Bagaimana upaya hakim dalam menangani atau menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut?

#### **D. *KajianPustaka***

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Terhadap Perkara Tanah dalam Hukum Acara Perdata. Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembutian, dan putusan pengadilan. Buku ini membahas tentang tata cara (prosedur) perdata di peradilan umum (peradilan perdata) yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan.

2. R. Soeroso, dalam bukunya yang berjudul *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 Tentang Putusan Pengadilan*. Buku ini membahas tentang *Yurisprudensi (Judge Law)*, dimana karena putusan pengadilan merupakan salah satu unsur dalam hukum acara perdata. Putusan pengadilan didasarkan pada fakta dan peristiwanya bukan pada hukumnya.
3. C.S.T. Kansil, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Buku ini membahas tentang suatu pengantar yang dapat menjadi bahan dasar untuk memahami hukum secara utuh dimana hal ini berkaitan dengan proses, penerapan, serta isi dari hukum itu.

Adapun perbedaan utama dengan penelitian adalah bahwa beberapa buku diatas tidak menjelaskan secara spesifik dalam konteks pemeriksaan setempat sebagai alat bukti perkara tanah.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan.**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui urgensi pemeriksaan setempat sebagai bukti terhadap perkara tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat.
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya hakim dalam menangani atau menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut.

## **2. Kegunaan.**

### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.

### **b. Kegunaan praktis**

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata serta dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata***

##### **1. Pengertian hukum acara perdata.**

Dalam literatur-literatur hukum acara perdata, ada berbagai macam definisi hukum acara perdata dari para ahli yang satu sama lain memberikan rumusan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.”<sup>1</sup>

Berbeda dengan Sudikno Mertokusumo memberi batasan hukum acara perdata yaitu “Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Cet. VI, Bandung: Sumur Bandung, 1975), h.13.

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya”<sup>2</sup>

R. Soepomo tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi, tugas, dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya “Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa hukum acara perdata adalah: a) peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*) kepada hakim/pengadilan; b) peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*); c) peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*) tersebut; d) peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).<sup>4</sup>

Dengan melihat beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi VII)*, Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 2.

<sup>3</sup>R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Cet. XIII, Jakarta: Pradnya Pramita, 1994), h. 13.

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 3-5.

hukum perdata materiil, tetapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.

## 2. Sumber-sumber hukum acara perdata

Pada praktik peradilan perdata di Indonesia sebagai sumber dasar penerapan hukum acara perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena belum adanya produk nasional tentang peraturan hukum acara perdata seperti halnya pada hukum acara pidana melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI 1981-76, TLNRI 3209).

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil maka dapatlah disebutkan bahwa sumber dasar penerapan hukum acara perdata dalam praktik peradilan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen Indonesia Baru, Staatsblad 1941 No. 44).<sup>5</sup>

HIR merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.19 Tahun 1964 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Sip/1972. HIR tidak

---

<sup>5</sup>Dalam doktrin lazim disebut lengkap dengan : “*Reglement op de uit oefening van de politie, de Burgerlijke rechtpleging en de Strafvordering onder de Indlanders en de Vrende Oostelingen of Java en Madura*” (Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura).

hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata saja, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sebagian ketentuan HIR khusus yang mengatur acara pidana dicabut.

Keseluruhan pasal – pasal HIR mengenai hukum acara perdata terhimpun dalam satu bab yaitu BAB IX tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:

- 1) Bagian Pertama tentang Pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 118 – 161);
- 2) Bagian Kedua tentang bukti (Pasal 162-177);
- 3) Bagian Ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187);
- 4) Bagian Keempat tentang banding (Pasal 188-194);
- 5) Bagian Kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);
- 6) Bagian Keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa (Pasal 225-236);
- 7) Bagian Ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245).

b. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Staatsblad 1927 No. 227*)

RBg merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927. Ketentuan hukum acara perdata termuat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh titel dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 323. Titel I, II, III, VI, dan VII sudah tidak berlaku lagi dikarenakan Pengadilan *Districtgerecht, Districraad*,



*Magistraadgerecht, Residenttigerecht, dan Raad Justitie* sudah dihapus. Sehingga yang berlaku hingga sekarang hanya titel IV dan V bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri). Titel IV terdiri dari:

- 1) Bagian I tentang Pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-188);
- 2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198);
- 3) Bagian III tentang Banding (Pasal 199-205);
- 4) Bagian IV tentang Putusan (Pasal 106-258);
- 5) Bagian V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272);
- 6) Bagian VI tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273-281).

Sedangkan bagian VII tentang bukti pada Pasal 282-314.

- c. Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voorde raden van Justitie op Java en het hoogerechtshof van Indonesie, alsmede voor de residentiegerechten op Java en Madura*, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa, Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63)

Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentiegerecht. Menurut pendapat R. Supomo oleh karena telah dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga

dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku.<sup>6</sup>Akan tetapi dalam praktik peradilan saat ini, eksistensi ketentuan dalam Rv oleh Judex Factie (PN dan PT) serta MARI tetap dipergunakan dan dipertahankan.<sup>7</sup>

- d. Kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab undang-undang hukum dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Meskipun KUHP Perdata sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), serta beberapa Pasal Buku II dan III (misalnya Pasal 533, 535, 1244, 1365). Selain itu hukum acara perdata juga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements Verordering*, Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348) dan *Reglement op de Rechtsterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesia* (R.O atau *Reglement* tentang organisasi kehakiman, Staatsblad 1847 No. 23) merupakan sumber dasar penerapan hukum acara perdata dalam praktik peradilan.

- e. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;<sup>8</sup>

<sup>6</sup>R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, h.11

<sup>7</sup>*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* Buku I dan II (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, 1993/1994) h. 126.

<sup>8</sup>Dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 ini, maka peraturan mengenai banding dalam HIR Pasal 188-194 tidak berlaku lagi.

- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;
  - 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986;
  - 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
- f. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung
- 1) Misalnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
  - 2) Sedangkan contoh beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI misalnya: SEMA No. 09 Tahun 1976 tentang gugatan terhadap pengadilan dan Hakim, SEMA No. 6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA No. 7 Tahun 1992 tentang pengawasan dan pengurusan biaya-biaya perkara dan SEMA No. 5/1994 tentang biaya administrasi.

g. Yurisprudensi

Mengenai pengertian yurisprudensi dikemukakan oleh beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain disebutkan:<sup>9</sup>

- 1) Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto).
- 2) Yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (Kamus Fockema Andrea).
- 3) Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan soal yang sama (Kamus Fockema Andrea).
- 4) Yurisprudensi adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik peradilan, berasal dari putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain (Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta).

Dari pengertian yurisprudensi yang dikemukakan dalam literatur tersebut diatas, bahwa pengertian yurisprudensi yang dikemukakan dalam Kamus Fockema Andrea adalah yang paling mendekati dan dijadikan paham yang sama.

---

<sup>9</sup>Pustaka Peradilan Jilid VIII (Jakarta: Penerbit Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1995), h. 146-147.

h. Adat Kebiasaan,<sup>10</sup> perjanjian internasional,<sup>11</sup> doktrin.<sup>12</sup>

### 3. Asas-asas dalam hukum acara perdata.

Seperti halnya hukum-hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa asas penting dalam hukum acara perdata, yaitu:

#### a. Hakim bersifat menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya yaitu dalam pelaksanaannya inisiatif untuk mengajukan tuntutan/gugatan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan diproses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*).<sup>13</sup> Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu

<sup>10</sup>Mengenai adat kebiasaan sebagai sumber hukum acara perdata diintrodusir oleh. Wirjono Prodjodikoro dengan menyebutkan bahwa “seperti halnya dengan segala hukum maka hukum acara perdata sebagian tertulis, artinya termuat dalam beberapa undang-undang negara, sebagian tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perdata. (Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. VI, Bandung: Sumur Bandung, 1975, h.18)”

<sup>11</sup>Definisi yang diambil Konvensi Wina Tahun 1969 disebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya, mengatur perjanjian antar-negara selaku subyek hukum internasional (“Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli”. Id.shvoong.com/law-and-politics/2158086-pengertian-perjanjian-internasional/, diunduh 15 Desember 2014, pukul 21.00 WIB)

<sup>12</sup>Doktrin antara ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga, sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah hukum (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h.9).

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 501

datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*index ne procedat ex officio*). Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

b. Peradilan yang terbuka untuk umum (*openbaarheid van rechtspraak*)

Sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata pada dasarnya terbuka untuk umum. Sebelum suatu perkara perdata mulai disidangkan maka hakim ketua harus menyatakan bahwa sidang “dibuka” dan “terbuka untuk umum”. Ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan untuk hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata itu di pengadilan sepanjang undang-undang tidak menentukan lain dan apabila tidak dipenuhi hal tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 13 UU No. 48 Tahun 2009).

Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil, dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum.<sup>14</sup> Untuk kepentingan kesusilaan hakim memang dapat menyimpang dari asas ini, misalnya dalam perkara perceraian karena perzinahan. Akan tetapi, walaupun pemeriksaan suatu perkara dilakukan secara tertutup, namun putusannya harus tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

c. Hakim bersikap pasif (*lijdelijkeheid van de rechter*)

---

<sup>14</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), h.17

Menurut Riduan Syahrani, asas ini mengandung beberapa makna yaitu: 1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*); 2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak.

Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim; 3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan verzet, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Jadi pengertian pasif disini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semua tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim juga berhak memberi nasihat

kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR/ 156 RBg).<sup>15</sup>

d. Tidak ada keharusan mewakilkan

Ketentuan dalam HIR maupun RBg tidak mengharuskan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan pengurusan perkara mereka kepada ahli hukum, sehingga pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup> Walaupun demikian, para pihak yang berperkara apabila menghendaki boleh mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 HIR/147 RBg). Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka hanya seorang sarjana hukum yang memiliki izin beracara/litigasi di pengadilan saja yang dapat mewakili seseorang untuk beracara di pengadilan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>R. Soepomo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), h.18

<sup>16</sup>Sistem hukum acara perdata dalam HIR dan RBg berbeda dengan sistem hukum acara perdata dalam Rv yang mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada seorang ahli hukum dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan keharusan yang mutlak dengan akibat batalnya tuntutan atau diputuskan diluar hadirnya tergugat apabila para pihak ternyata tidak diwakili. Sistem yang mewajibkan bantuan dari seorang ahli hukum dalam Rv ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di dalam suatu proses yang memerlukan pengetahuan hukum dan kecakapan teknis, maka para pihak yang berperkara perlu dibantu oleh seorang ahli hukum supaya segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan putusan dijatuhkan dengan seadil-adilnya.

<sup>17</sup>Pasal 3 UU No. 18/2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa:

1) untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara di Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.



e. Mendengar kedua belah pihak yang berperkara (*horen van beide partijen*)

Asas ini berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, diberikan kesempatan yang sama, untuk membela kepentingan mereka. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar tanpa mendengar atau memberi kesempatan kepada pihak yang lain untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim tidak boleh memberikan putusan dengan tidak memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak yang berperkara. Putusan *verstek* bukanlah merupakan pengecualian asas ini, karena putusan *verstek* dijatuhkan justru karena tergugat tidak hadir dan ia juga tidak mengirimkan kuasanya, padahal ia sudah dipanggil dengan patut. Jadi, pihak tergugat yang tidak hadir telah mendapat kesempatan untuk didengar, akan tetapi ia tidak mempergunakan kesempatan itu.

f. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Alasan-alasan atau argumentasi itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai

---

2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

nilai obyektif.<sup>18</sup> Putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangannya (*anvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.

g. Beracara perdata dikenakan biaya (*niet-kosteloze rechtspraak*)

Untuk beracara perdata pada dasarnya dikenakan biaya<sup>19</sup> (Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 121 ayat (4) HIR/ 145 ayat (4) RBg, Pasal 182 HIR/ 192 RBg, Pasal 183 HIR/ 194 RBg). Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Polisi (Pasal 237 HIR/ 273 RBg). Dalam Pasal 11 Lampiran A SEMA No. 10 Tahun 2010<sup>20</sup> disebutkan bahwa pemohon bantuan hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa setempat, surat keterangan tunjangan sosial, atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Apabila penggugat yang mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohonan diajukan bersamaan dengan gugatan atau pada saat pemohon

<sup>18</sup>Scholten, Algemeen Deel, h.114. Dikutip juga oleh Sudikno Mertokusumo, h.15

<sup>19</sup>Berdasarkan SEMA No.5 Tahun 1994, biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya administrasi.

<sup>20</sup>Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, SEMA No.10 Tahun 2010, Pasal 11 Lampiran A.

mengajukan gugatan secara lisan sebagaimana dalam Pasal 237-241 HIR / 273-277 RBg.

Sedangkan apabila diajukan oleh tergugat, maka permohonan pembebasan berperkara diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban. Kemudian majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang pengabulan atau penolakan berperkara secara prodeo, memeriksa bahwa penggugat atau tergugat tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Pasal 19 Lampiran A SEMA No.10 Tahun 2010.

#### **4. Hukum pembuktian pada pemeriksaan perkara perdata.**

Pembuktian adalah tahap terpenting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktianlah hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Acara pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Proses pembuktian ini merupakan suatu susunan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa, kejadian, maupun hak. Pembuktian itu sendiri diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-

perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Hukum pembuktian itu sendiri terdiri dari :

- a. Pembuktian formil, yang mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR
- b. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.

Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan tetapi adanya suatu hak juga dapat dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.<sup>21</sup>

Munir Fuady dalam bukunya mengungkapkan sejarah mengenai hukum pembuktian. Dipaparkan bahwa hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat se-primitif apapun dia pada hakikatnya memiliki rasa keadilan dimana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah ataupun memenangkan orang yang tidak

---

<sup>21</sup>Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 9.

berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru maka dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.<sup>22</sup>

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebihingan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup> Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.<sup>24</sup>

#### a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, yaitu sebagai berikut :

##### 1) Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan

---

<sup>22</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, cet. I. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 9.

<sup>23</sup>M.YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.498

<sup>24</sup>R.Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), h.107

menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sikap pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekadar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang.

---

<sup>25</sup>M.YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan*, h.500

- b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan.

## 2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta persidangan

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta.

- a) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan.

Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, para pihak diberi kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti itu diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>M.YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.500-501

b) Fakta yang terungkap di luar persidangan

Hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Sehubungan dengan itu, fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara.

c) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian hanya:

- 1) Terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.
- 2) Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayal atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran.<sup>27</sup>
- 3) Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas

---

<sup>27</sup>M.YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 501



materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan itu, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan sebagai berikut: <sup>29</sup>

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat

Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila:

1) Pengakuan diberikan secara tegas (*expressis verbis*)

Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.

2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat

---

<sup>28</sup>M.YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan*, h. 505.

<sup>29</sup>M.YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan*, h. 505-506

Syarat yang kedua, pengakuan itu bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri

Seandainya tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri, maka peristiwa itu tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat. Oleh karena itu tidak boleh dikonstruksikan sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas, baru sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara.<sup>30</sup>

c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reason*) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan

---

<sup>30</sup>M.YahyaHarahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 506.

sangkalan tanpa alasan untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya.

Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijk*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdara.<sup>31</sup>

#### d. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta mesti dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai yang didalilkan atau *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain.

##### 1) Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Bertitik tolak dari doktrin *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif, melainkan semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum yang mana yang dilanggar dan diterapkan, karena hal itu sudah diketahui hakim. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka tuntutan atas doktrin ini tidak hanya terbatas pada hukum positif yang berlaku nasional dan domestik. Pengetahuan hakim harus menjangkau konvensi hukum internasional.

---

<sup>31</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 506-507

## 2) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas tetapi telah diterima secara luas sebagai doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *notoir feiten* atau fakta notoir. Hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum. Fakta yang diketahui umum ini mempunyai makna bahwa setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman.

Mereka dianggap mesti mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam, dan hal itu diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan bermasyarakat bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan suatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.

## 3) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.

## 4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya.<sup>32</sup>

##### 5) Bukti lawan (*tegenbewijs*)

Di dalam ketentuan Pasal 1918 KUH Perdata pada akhir ayat disebutkan, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs* / counter proof. Bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti yang diajukan tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat, berarti merupakan bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan penggugat.<sup>33</sup>

Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan yaitu selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga bermaksud untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut. Yang terpenting yang harus diperhatikan bahwa pengajuan bukti

---

<sup>32</sup>M.YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan*, h. 513

<sup>33</sup>M.YahyaHarahap, *HukumAcaraPerdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusanPengadilan*, h.514.

lawan haruslah berdasarkan asas proporsional. Artinya, bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu:<sup>34</sup>

- a) Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan;
- b) Alat bukti lawan yang diajukan sama jenisnya dengan alat bukti yang dilawan;
- c) Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Akan tetapi, persyaratan tersebut tidak mutlak sifatnya. Apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain, maka syarat tersebut dapat disingkirkan.



## **B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata**

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.515.

bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah disebutkan bahwa mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan terakhir alat bukti sumpah.

### **1. Alat bukti surat.**

Alat bukti surat dalam perkara perdata merupakan bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lain dalam lalu lintas keperdataan. Apabila ditinjau dari visi gradisinya atau urutannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, maka alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan pertama, oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan yang utama, oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti pembuktian utama.<sup>35</sup> Dalam hukum acara perdata alat bukti ini diatur dalam Pasal 138 HIR/164 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Pasal 285-305 RBg, Staatblads 1867 Nomor 29, dan Pasal 1867-1894 KUHPerdata.

Surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya); secarik kertas dan sebagainya sebagai

---

<sup>35</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, h.160.

tanda atau keterangan; atau sesuatu yang ditulis, yang tertulis, atau tulisan.<sup>36</sup> Dalam

*Black's Law Dictionary*, surat diartikan sebagai:

*“one of the arbitrary marks or characters constituting the alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or articulations of the human organs of speech.”*<sup>37</sup>

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai pengertian alat bukti dalam bentuk tertulis yang biasa disebut dengan surat. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:

*“alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”*<sup>38</sup>

sedangkan Riduan Syahrani mengemukakan bahwa:

*“alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”*<sup>39</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

<sup>36</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1250.

<sup>37</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Fourth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1997), h. 712

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h. 100-101

<sup>39</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), h. 60.



Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta

Adapun yang dimaksud dengan akta menurut Riduan Syahrani adalah “suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.”<sup>40</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”<sup>41</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap surat itu merupakan akta. Unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan ditanda-tangani. Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dan dengan penandatanganan itu, seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan penandatanganan itu sendiri ialah membubuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spesialisasi

---

<sup>40</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), h.106.

<sup>41</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h.106

suatu surat atas nama si pembuat. Penandatanganan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kehendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari, atau cap jempol dianggap identik dengan tanda-tangan, asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak yang berwenang dikenal dengan *waarmedking*.<sup>42</sup>

Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

#### 1) Akta Otentik

Secara teoritis, apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dan secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu, tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Sedangkan secara dogmatis, apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”<sup>43</sup> Dan pasal 165 HIR/285 RBg bahwa “Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat

---

<sup>42</sup>Dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan, dimasukkan oleh notaris ke dalam buku khusus. Artinya bahwa notaris menyatakan bahwa dokumen/surat tersebut tercatat/registered dalam buku khusus notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

<sup>43</sup>KitabUndang-UndangHukumPerdata (Burgerlijkwetboek), diterjemahkanolehSubektidan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PradnyaParamita, 2008), Pasal 1868.

menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”<sup>44</sup>

Dari kedua defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada akta otentik yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum dan ada yang dbuat di hadapan pegawai atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*). Pejabat yang berwenang memuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan dan lain-lain sebagainya. Berita acara pemeriksaan suatu perkara di persidangan yang dibuat panitera, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh juru sita, dan berita acara pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh polisi, merupakan akta-akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Sedangkan akta jual-beli tanah dibuat dihadapan camat atau notaris merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang

---

<sup>44</sup>Reglemen Indonesia yang Dibaharui S.1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M.Karjadi, Pasal 165.

berwenang.<sup>45</sup> Untuk membuat akta partai pejabat tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat justru pejabatlah yang bertindak aktif, yaitu dengan inisiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan tidak lain daripada keterangan tertulis dari pejabat, sedangkan dalam akta partai berisikan keterangan tertulis para pihak sendiri yang dituangkan oleh pejabat ke dalam akta.<sup>46</sup> Adapun kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik merupakan perpaduan dari kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil sehingga akta otentik tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).<sup>47</sup>

a) Kekuatan bukti luar

Dalam hal ini berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, samai terbukti sebaliknya. Suatu akta otentik harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut bukanlah akta otentik. Selama tidak dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar, maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, h.163

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 163

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* h.566

pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentifikasinya. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR.<sup>48</sup>

Sehingga sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya suatu cacat hukum karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang atau tandatangan pejabat didalamnya adalah palsu atau isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.<sup>49</sup>

b) Kekuatan pembuktian formil

Pasal 1871 KUHPerdara menjelaskan bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda-tanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang

---

<sup>48</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 153-154

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 566-567

menandatangananinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta.

c) Kekuatan pembuktian materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik yaitu menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Dengan kata lain membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.

2) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.<sup>50</sup> Mengenai akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam *Staatsblad* 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 – 305 RBg / Pasal 1874-1880 KUHPerdara. Termasuk dalam pengertian surat di bawah tangan menurut Pasal 1 *Staatblad* 1867 No.29 ialah akta di bawah tangan, surat-surat daftar (*register*), catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sudah barang tentu tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Tidak demikian halnya dengan akta otentik, menurut M. Yahya Harahap, pada akta di bawah tangan tidak melekat kekuatan pembuktian lahir, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan

---

<sup>50</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h.151

materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik.<sup>51</sup>

Mengenai hal ini, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengemukakan bahwa oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Baru kalau tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna.

Sehingga kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan, antara lain meliputi:

a) Kekuatan pembuktian formil

Apabila tanda tangan pada akta di bawah tangan telah diakui, maka berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari si penanda tangan. Kekuatan pembuktian pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.<sup>52</sup>

b) Kekuatan pembuktian materiil

Menurut Pasal 1875 KUHPerdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut

---

<sup>51</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.591.

<sup>52</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h. 155.

undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Jadi isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti. Sedangkan terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.<sup>53</sup>

### 3) Surat bukan akta

Surat bukan akta ialah surat yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Baik HIR, RBg, maupun KUHPerdara tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUHPerdara.

Di dalam pasal 1881 KUHPerdara dan 1883 KUHPerdara diatur secara khusus beberapa surat-surat dibawah tangan yang bukan akta. Dikarenakan tidak diatur mengenai kekuatan pembuktiannya, maka surat-surat yang demikian itu hanya dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. Sehingga, perihal kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta tersebut sepenuhnya

---

<sup>53</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h.156.



diserahkan kepada penilaian hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdota.

Disamping sebagaimana disebutkan di atas, UU masih menetapkan beberapa surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap. Berdasarkan pasal 1881 KUHPerdota, disebutkan bahwa Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:

- a) Dalam hal surat itu, menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima;
- b) Bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan. Dalam segala hal lainnya, hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu.

## **2. Alat bukti saksi.**

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut dengan kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR – 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/ 169 HIR – Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdota.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal ini diatur dalam Pasal 165 RBg/ 139 HIR dan Pasal 1895 KUHPdata, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Mengenai ketentuan bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi di atur dalam Pasal 140 ayat (1) HIR/ 166 ayat (1) RBg dan Pasal 148 HIR/ 176 RBg, dimana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberikan keterangan dapat diberikan sanksi juga. Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat (1) HIR/ 165 ayat (1) RBg).

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana

di atur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta pasal 1910 KUHPperdata.

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatar-belakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian. Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi.<sup>54</sup>

### **3. Alat bukti persangkaan.**

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPperdata. Satu-satunya pasal dalam HIR yang mengatur mengenai persangkaan adalah Pasal 173 HIR/310 RBg. Pasal ini sendiri tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan tetapi hanyalah mengemukakan bahwa persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, hanya harus diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan keputusan,

---

<sup>54</sup>R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), h.119

jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan satu sama lain bersetujuan. Pasal 1915 KUHPerdara menyebutkan bahwa “persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”<sup>55</sup>

Pembuktian dengan persangkaan dilakukan apabila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang di dasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan ketidakhadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim, maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.

#### a. Persangkaan menurut undang-undang

---

<sup>55</sup>Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No.44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, ...., Pasal 173.

Menurut Pasal 1916 KUHPerdato<sup>56</sup>, persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam ini menurut Pasal 1916 KUHPerdato antara lain:

- 1) Perbuatan yang oleh UU dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang.
- 2) Hal-hal dimana oleh UU diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
- 3) Ketentuan yang oleh UU diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
- 4) Kekuatan yang oleh UU diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Persangkaan menurut UU ini dibagi menjadi dua, antara lain *praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan dan *praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.<sup>57</sup>

b. Persangkaan berdasarkan keyakinan hakim

---

<sup>56</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Pasal 1916.

<sup>57</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h.171

Persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdara. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Berbeda dengan persangkaan menurut UU, maka di sini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

#### **4. Alat bukti pengakuan.**

Pengakuan (*bekentis confession*) sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR / 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Dengan demikian, maka dengan adanya pengakuan

maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

Mengenai pengakuan di muka hakim di depan persidangan haruslah diperhatikan ketentuannya dalam Pasal 1926 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pengakuan di muka hakim di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali.

Berbeda dengan pengakuan di muka hakim di persidangan, pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya.<sup>58</sup> Pengakuan diluar persidangan diatur dalam Pasal 175 HIR / 312 RBg, Pasal 1927-1928 KUHPerdara. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan diluar sidang ini dapat ditarik kembali.<sup>59</sup>

Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan yang terakhir pengakuan dengan klausula. Yang dimaksud dengan kualifikasi bukan semata-mata sangkalan,

---

<sup>58</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h. 178

<sup>59</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h. 179

tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan. Demikian juga pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dengan tambahan yang bersifat membebaskan.<sup>60</sup>

### 5. Alat bukti sumpah.

Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 155-158 HIR/ 182-185 RBg, Pasal 177 HIR/314 RBg, dan Pasal 1929-1945 KUHPerdata. undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud sumpah dalam hukum acara perdata, maka dari itu para ahli hukum memberikan pengertian, antara lain Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa “*sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.*”<sup>61</sup> Menurutny, ada dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk *sumpah promissoir* adalah sumpah saksi dan sumpah ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sedangkan *sumpah confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.

---

<sup>60</sup>Eman Suparman, *Alat Bukti pengakuan dalam Hukum Acara Perdata* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, s.1), h.18.

<sup>61</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h.179-180.



Dalam pembuktian hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. Pasal 177 HIR/314 RBg menyatakan bahwa *“Kepada seorang, yang dalam satu perkara telah mengangkat sumpah yang ditangguhkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya itu.”*

Sumpah harus dilakukan di persidangan, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya dapat dilakukan di hadapan lawannya (Pasal 158 HIR/185 RBg, Pasal 1944-1945 KUHPerdata). Sumpah tidak memberi pembuktian selain untuk keuntungan atau kerugian yang memerintahkan atau yang mengembalikannya atau ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1937 KUHPerdata).

HIR sendiri menyebutkan ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan sumpah penaksir (*aestimatoir / schattingseed*).

#### a. Sumpah pemutus (*decisoir*)

Sumpah pemutus ialah sumpah yang oleh pihak yang satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk

menggantungkan putusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya ini diatur dalam Pasal 156 HIR/183 RBg dan Pasal 1930 KUHPerdara. Sumpah ini juga disebut dengan sumpah yang menentukan adapun pihak yang memerintahkan atau meminta mengucapkan sumpah disebut *deferent*, yaitu pihak yang memerintahkan sumpah pemutus, sedangkan pihak yang diperintahkan untuk bersumpah disebut *delaat* atau *gedefereerde*.

Sumpah pemutus ini dapat dibebankan dan diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus ini datang dari salah satu pihak (*deferent*) dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Dan sumpah pemutus itu dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus dengan akta otentik (Pasal 157 HIR/184 RBg, Pasal 1945 KUHPerdara).<sup>62</sup>

Hakim tidak boleh menolak keinginan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sumpah pemutus. Hakim hanya mempertimbangkan, apakah hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan dilakukan dengan sumpah tersebut akan membawa pada penyelesaian perkara dan apakah benar-benar mengenai hal-hal dan kejadian-kejadian yang benar tidaknya memang dapat dikuatkan oleh sumpah dari pihak yang berperkara. Bila segala

---

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, h. 181-182

sesuatu untuk melakukan sumpah telah terpenuhi, hakim harus memperkenankan penyumpahan itu dan harus memberi putusan sesuai dengan bunyi sumpah tersebut. Pihak yang memerintahkan pihak lawannya untuk bersumpah harus dikalahkan, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain. Jika pihak yang dikalahkan menuduh bahwa sumpah yang diangkat pihak lawannya itu palsu, maka ia dapat mengajukan pengaduan kepada aparat yang berwenang dan meminta supaya pihak yang mengangkat sumpah itu dapat dituntut dalam perkara pidana atas dakwaan bersumpah palsu yang disebut dalam pasal 242 KUHP.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemeriksaan Setempat sebagai Alat Bukti Sengketa Tanah***

#### **1. Pembuktian dalam hukum Islam.**

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “Al-bayinah” yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Ibn al-Qayyim dalam kitabnya *At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.<sup>63</sup> Secara terminologis pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Supono menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Alam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti

---

<sup>63</sup>Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135.

yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu.<sup>64</sup>

Dalam Hukum Islam keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkat keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Yaqiin* yaitu meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- b. *Zhaan* yaitu sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%)
- c. *Shubhaat* yaitu ragu-ragu (terbukti 50%)
- d. *Waham* yaitu sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah.<sup>65</sup>

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat ini memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad saw lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Hal ini juga menyebabkan para hakim harus berhati-hati untuk tidak mengambil keputusan.<sup>66</sup>

## 2. Alat bukti yang digunakan dalam hukum Islam.

---

<sup>64</sup>Gatot Suparmono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 15

<sup>65</sup>Agil Huslin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas (Jakarta: Pena Madia, 2004), h. 54

<sup>66</sup>Agil Huslin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas, h. 56

Dipandang dari pihak yang berperkara, alatbukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang dari pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti itu digunakan untuk pencari keadilan maupun pengadilan suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim akan tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.<sup>67</sup>

Didalam kitab hukum islam kebanyakan para ahli hukum islam menyebutnya dengan *al-bayyinatu 'ala al-mudday wa al-yamin ala man ankur*. Dalam hukum islam terdapat banyak ayat alquran sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya terdapat dalam ayat QS. al-Imran/3: 81 yaitu:

Terjemahnya:

dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu" mereka menjawab: "Kami mengakui".

---

<sup>67</sup>Agil Huslin Al Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas, h, 68

Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".<sup>68</sup>

Dan juga terdapat di dalam ayat QS. an-Nisa/4: 6 yaitu sebagai berikut:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>69</sup>

Sehubungan dengan ayat ini, ada berbagai alat bukti yang dapat dianjurkan dalam persidangan dipengadilan berdasarkan hukum Islam. Alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 120

<sup>69</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 538.

### 1. *Ikrar* (pengakuan)

Yaitu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

### 2. *Syahadah* (saksi)

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam muka sidang, dengan memenuhi syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan dia alami sendiri. Sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

### 3. *Yamin* (sumpah)

Yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.<sup>70</sup>

### 4. *Riddah* (murtad)

Yaitu pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar agama dari ajaran agama Islam. Tata cara pernyataan Riddah ini hampir sama dengan Ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya bersifat formal dihadapan pemuka agama Islam.

### 5. *Maktubah* (Alat bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud disini terdiri atas dua hal, yaitu:

- a. Akta, akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi *absolut* suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim Pengadilan

---

<sup>70</sup> Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, h. 142.

Agama. Jenis-jenis akta yang digunakan antara lain yaitu akta nikah dan akta kelahiran dalam perkara pemeliharaan anak dan akta ikrar dalam perkara harta wakaf.

- b. Surat keterangan, digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi Pengadilan Agama yng memutuskan perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya surat keterangan domisili pihak yang bersengketa.

6. *Tabayyun* (limpahan pemeriksaan)

Adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sedang memeriksa.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup>Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, h. 142-143.



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### **A. Jenis Dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap sengketa tanah sebagaimana selama ini pemeriksaan setempat hanya sebatas sebagai bukti tambahan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif) dan teologi normatif (hukum Islam). Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

##### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

1. *Data primer* merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kuantitatif.

2. *Data sekunder* merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

1) Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

2) Kutipan Tidak Langsung

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>1</sup>
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>2</sup>

Penelitian ini, menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut: Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian surat tersebut diteruskan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada bagian Balitbangda, lalu diteruskan ke kantor Walikota Makassar sesuai lokasi mendapatkan surat izin penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.<sup>3</sup>

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “*divalidasi*” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun lapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Ronny HanitidjoSoemitro, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 46.

<sup>2</sup>SutrisnoHadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 172.

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Pedoman observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
3. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
5. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data.**

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

**b. Analisis Data.**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Urgensi Pemeriksaan Setempat Sebagai Bukti terhadap Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Makassar***

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/ majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/ majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K?Pdt/1984. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*).<sup>1</sup>

Tujuan Pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang

---

<sup>1</sup>Mashudi Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151

sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.<sup>2</sup>

Syarat-syarat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv):

- a. dihadiri para pihak;
- b. datang ketempat objek sengketa;
- c. panitera membuat berita acara;
- d. hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.<sup>3</sup>

Yang melakukan pemeriksaan setempat adalah majelis hakim minimal satu orang dan dibantu panitera karena jabatannya atas permintaan para pihak (Vide Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv) yang tidak memerlukan persetujuan tergugat. Permintaan para pihak tersebut diputuskan dan dituangkan dalam Putusan Sela (*Interlocutoir Vonnis*).<sup>4</sup>

Berikut ini beberapa Putusan kasus pemeriksaan setempat dalam kasus perkara tanah di Pengadilan Negeri Makassar:

---

<sup>2</sup>Mashudi Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 151.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Penyitaan, Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 782.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Penyitaan, Putusan Pengadilan*, h. 783.

# 1. Kasus posisi pertama

Gambaran secara umum mengenai perkara ini, dimulai dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, dikatakan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah (objek perkara) dengan sertifikat Hak Milik No. 21221/Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan surat ukur No.00972/Tamamaung/2003, tanggal 13 November 2003 Luas +/- 5000m<sup>2</sup>, atas nama Dra. Med. Nony Meywati Binti H. Parawangsa dengan batas – batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah milik PT. Pattujuang
- b. Sebelah Timur : Tanah milik Mustafa, tanah milik Drs. Sampara Mahmud M.B.A., lorong dan tanah milik Ir. Fajar;
- c. Sebelah Selatan : Rumah P. Sappe, pekarangan rumah P. Dullah, Jln. A.P Pettarani II F/Lr.14 jalan ke Masjid Zautul Balag, pekarangan Masjid Zautul Balag, Jln. A.P. Pettarani II E/Lr.12, dan tanah Kavling Muh. Basri;
- d. Sebelah Barat : Rumah Maswadi, S.S, tanah milik PT. Pattujuang;

Selanjutnya, tanah objek perkara saat ini telah terpecah – pecah oleh dua (2) jalanan, satu (1) lorong serta beberapa bangunan rumah berdiri diatasnya termasuk sebuah masjid Ic. Masjid Zautul Balag, namun masjid Zautul Balag tidak terlalu dipermasalahkan. Kemudian, untuk mempermudah identifikasi objek sengketa yang telah terpecah-pecah maka penggugat



merinci menjadi tiga (3) bagian berdasarkan penguasaan–penguasaan tergugat:

1. Tanah di atasnya berdiri rumah tergugat I (Sulifa), dengan luas +- 72 m<sup>2</sup>
2. Tanah yang dikuasai dan atau berdiri rumah di atasnya, masing-masing tergugat II (Mustafa Lasulika) dialihkan ke Tergugat II (Tajuddin), Tergugat IV dan V (Mukhsin dan Siti Hubaedah), Tergugat VI (Nurjanah), Tergugat VII (Hj. Suriah), Tergugat VIII (Drg. Hasmawati Hasan), Tergugat IX (Liong Faisal), Tergugat X (Drs. Sampara Mahmud M.B.A), dengan luas +- 2.549m<sup>2</sup>

Dalam beberapa petitumnya, penggugat memohon untuk :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik sah penggugat;
- 3) Menyatakan tanah diatas Masjid Zautul Balag berdiri, penggugat tidak mempermasalahkan;
- 4) Menyatakan perbuatan para tergugat mengklaim, menempati dan mengaku tanah objek perkara merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
- 5) Menghukum para tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan aman, utuh, sempurna tanpa ada beban di atasnya;

- 6) Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari keterlambatan para Tergugat mentaati isi putusan a quo terhitung sejak putusan *inkracht*;
- 7) Menyatakan surat – surat kepemilikan / sertifikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama para tergugat atas objek perkara dinyatakan tidak mengikat;

Dalam sengketa ini, melalui konsiderannya Majelis Hakim mengambil kesimpulan eksepsi para tergugat dan turut tergugat dengan menimbang bahwa:

1. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (daluwarsa), karena objek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat selama +- 20 Tahun;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libellum*), karena gugatan penggugat tidak menerangkan secara spesifik letak lokasi objek sengketa dan penggugat menunjuk lokasi yang telah bersertifikat serta yang telah dikuasai secara fisik oleh para pemegang sertifikat a quo;
3. Bahwa gugatan penggugat salah alamat karena objek sengketa yang digugat bertentangan dengan fakta dilapangan in casu lokasi – lokasi yang sedang dikuasai oleh para tergugat; Dalil gugatan menunjuk objek sengketa berasal dari tanah yang dikuasai oleh negara, sedangkan yang sebenarnya lokasi tanah yang dikuasai para tergugat berasal dari konversi milik Adat, sedangkan mengenai alasan penggugat SHM No.21221 telah

mendapat putusan PTUN Makassar dalam Perkara No. 26/G.TUN/2004/PTUN Makassar;

4. Bahwa gugatan penggugat tidak beralasan menempatkan turut tergugat sebagai pihak perkara ini, karena turut tergugat sama sekali tidak berkepentingan;
5. Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai penggugat, sebab penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa secara fisik, dan penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas objek perkara ini.

## 2. Kasus posisi kedua

Selanjutnya melalui putusannya No. 233/Pdt.G/2005/PN.Mks Pada tanggal 24-8-2006, Majelis Hakim yang diketuai oleh ASLI GINTING, SH dan hakim anggota Abner Sitomorang, SH., MH, Titus Tandi, SH serta Panitera Pengganti Sri Bulan, SH., memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan batas – batas yang dimaksud diatas;
3. Menyatakan perbuatan tergugat – tergugat yang mengklaim, menempati, dan atau menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat – tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan aman, utuh, dan sempurna tanpa ada beban diatasnya;

5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari keterlambatan para tergugat mentaati isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan surat-surat kepemilikan/seritipikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang ada atas nama para tergugat dan atau atas nama siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mengikat;

Selanjutnya, karena para tergugat merasa belum puas terhadap putusan tersebut melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat melakukan upaya hukum (*banding*).

Yang mana keluarlah putusan No.159/Pdt/2007/PT.Mks, Memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari para tergugat / pembeding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Agustus 2006 yang dimohonkan;
3. Menghukum para tergugat / pembeding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-

Setelah itu, para tergugat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum (*Kasasi*) dengan putusan Putusan Kasasi No. 2362. K/Pdt/2007, Memutuskan:

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi / para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-

Selanjutnya, para tergugat memohon untuk melakukan upaya hukumnya dengan mengajukan bukti – bukti baru (*Novum*) yang mana diputuskan melalui putusan peninjauan kembali No. 639/PK/Pdt/2011, Memutuskan :

1. Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum para pemohon peninjauan kembali/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- ;

Dalam perkara sengketa tanah ini, tergugat maupun para tergugat melakukan upaya-upaya hukum atas putusan diatas dengan alasan bahwa Amar Putusan-putusan telah keliru, dikarenakan objek perkara telah salah lokasi berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pihak para tergugat, sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai surat No. 3309/600.13-73.71/X/2013 bahwa penerbitan SHM No.72/Kel. Panaikang atas nama P. Dg. Mangati yang diganti menjadi SHM No. 21221/Kel. Tamamaung atas nama P. Dg. Mangati yang beralih kepada Dra. Med Nony Meywati binti H. Parawangsa tidak berada di atas tanah sertifikat Hak Milik No. 735/Panaikang adalah merupakan sertifikat pemisahan dari SHM No.01/lingkungan tamamaung, seluas 50.434M<sup>2</sup> dengan pemegang hak HADDONG Dg. NGEMPO dengan penunjuk riwayat bekas tanah milik Indonesia Persil 5 SII Kohir No. 893 Cl. Dan selanjutnya SHM No. 735/Panaikang dipecahkan menjadi SHM No. 764/Panaikang s/d

767/Panaikang. Sedangkan untuk SHM No. 766/Panaikang dipecahkan menjadi SHM No. 1062/Panaikang s/d 1064/Panaikang. Kemudian untuk SHM No.1063/Panaikang (direferensi menjadi SHM No. 20864/Tamamaung) a/n pemegang hak Drg. Fonny Dahong selanjutnya dialihkan kepada Drg. Hasmawati Hasan berdasarkan akta jual beli No. 1470/III/3/X/2000

2. Bahwa hal ini diperkuat oleh putusan PTUN No.26/G.TUN/2004/PTUN.Mks (8Maret 2005) jo. No. 60/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS (29 Agustus 2005) yang memenangkan para tergugat *Intervensi* dalam perkara di Pengadilan TUN dan PTTUN dimana hal ini turut membenarkan sertifikat para tergugat.

Selain itu pemeriksaan setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Sehingga hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan, dan hakim dianggap tahu akan hukumnya ( *Lus Curia Novit* ) agar dapat menjatuhkan putusan.<sup>5</sup> Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan (Pasal 23 ayat 1). ,Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawah, oleh karena itu haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsideran itu merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat atas putusan itu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Pemeriksaan setempat bisa dilakukan dan bisa saja tidak dilakukan oleh Majelis Hakim yang

---

<sup>5</sup>Mustari, *Panitera Pengadilan Negeri Makassar* , wawancara pada tanggal 10 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Makaassr.

menyidangkan perkara, semua tergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian di persidangan, apakah dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat untuk membuat jelas tentang keadaan, lokasi, batas dan ukuran dari objek barang sengketa, dan perintah pelaksanaan untuk pemeriksaan setempat tersebut dituangkan dalam Putusan Sela yang berisikan tentang penunjukan seorang Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dan kemudian juga harus dideskripsikan secara jelas dan rinci tentang hal-hal yang harus diperiksa, dan pemeriksaan setempat tersebut haruslah dihadiri oleh para Pihak (Penggugat dan Tergugat), Panitera membuat Berita Acara, atau Akta Pendapat (Jika dipandang perlu).

#### ***B. Kesulitan yang di alami oleh Hakim dalam Pemeriksaan Setempat***

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan setempat tidak jarang hakim menemukan kendala-kendala dilapangan diantaranya adalah :

##### **1. Personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat**

Apabila di anggap perlu,dapat di lakukan pemeriksaan oleh hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.(Pasal 153 ayat 1 HIR Pasal 180 ayat

---

<sup>6</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 193

1 RBg).Panitera membuat berta acara pemeriksa setempat yang di tanda tangani oleh hakim dan panitera tersebut (Pasal 153 ayat 2 HIR/Pasal 180 ayat 2 RBg).pendegelasan pemekrisaan setempat kepada pengadilan negeri di tempat objek perkara terletak(Pasal 180 ayat 3 RBg).Kententuan ini tidak di temukan dalam HIR.Menurut HIR/RBG yang melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut adalah seorang hakim atau dua orang hakim dan panitera.Hakim tersebut di sebut hakim komisaris.Sedangkan menurut SEMA Nomor 7 Tahau 2001yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah majelis hakim dan panitera pengganti.praktiknya yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah majelih hakim dan panitera penganti.

2. Tidak terlibatnya saksi ahli
3. Persoalan keamanan
4. Sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

Kesulitan-kesulitan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar pengadilan. Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.



Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat hakim juga sering mengalami kesulitan yaitu:

a. Objek sengketa

Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak, sedangkan menurut Pasal 211 ayat (2) RV. Pemeriksaan setempat dapat di laksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit di bawa keruang sidang, menurut Surat Endaran Mahkamah Agung RI. No. 7 Tahun 2010 pemeriksaan setempat dikususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut di eksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut di pahami secara cermat, bahwa pemeriksaan setempat itu di laksanakan untuk memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi yang sulit di bawa di persidangan.

b. Pengamanan pemeriksaan setempat

Perlu tidaknya pengamanan dalam pemeriksaan setempat di serahkan oleh majelis hakim, tentu majelis hakim mngetahui situasi dan kondisi keamanan di sekitar lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman meminta bantuan polisi.

c. Penguasaan lahan tanah secara *de factordan de yure*.

d. Sudah di muati unsur premanisme lokasi tanah

- e. Prosedur penerbitan supradit dan sertifikat di muati dengan unsur penipuan dan keterangan palsu.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Bahwa Pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan bagi hakim, dan dalam Putusan Pengadilan, pemeriksaan setempat dtersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim, dasar untuk mengabulkan gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan dasar untuk menentukan luas. Dalam pemeriksaan setempat, tidak jarang ditemui kendala-kendala diantaranya, masalah personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, tanpa melibatkan saksi Ahli, masalah keamanan, dan sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

### ***C. Upaya Hakim dalam menangani Kesulitan-kesulitan Pemeriksaan Setempat***

Apabila Hakim menjumpai kesulitan ataupun kendala dalam praktek maka harus mencari pemecahan masalah dengan melihat tata cara pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR serta Pasal 180 RbG. Hakim bisa menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Ada pun upaya hakim menagani kesulitan-kesulitan pemeriksaan setempat yaitu:

---

<sup>7</sup>Asli Ginting, *Pengadilan Negeri Makaassar, Wawancara*, pada tanggal 05 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Makassar.

### 1. Mencari riwayat tanah

Pada dasarnya surat keterangan riwayat tanah merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan hukum antara penggarap dengan tanah yang di garapnya. Biasanya dokumenn ini di perlukan bagi penduduk-penduduk local yang belum melakukan sertifikat terhadap tanah yang di garapnya selama bertahun-tahun. Istilah surat keterangan tanah itu sendiri berbeda di masing-masing daerah, tercatat terdapat beberapa istilah yakni sebagai berikut:

- a) Surat pernyataan tanah
- b) Surat pernyataan surat tanah garapan
- c) Surat pernyataan kepemilikan tanah
- d) Surat pernyataan riwayat tanah

Namun semua istilah tersebut pada dasarnya bermaksud satu sama lainnya yaitu bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan suatu hak milik atas tanah karena belum di lakukan pengurusan sertifikat terhadap tanah yang di milikinya. Pada dasarnya pengurusannya di lakukan di hadapan kepala desa dan Camat dimana tanah itu berada. Lebih lanjut dokumen tersebut juga harus di ketahui dan di tanda tangani oleh Camat setempat.

### 2. Beda kasus

Memanggil pemilik awal dari tanah yang di sengketahkan dan memanggil pemilik akhir yg membeli tanah tersebut dari pemilik awal serta meminta keterangan tokoh masyarakat misalnya: (1).RT, (2).RW, (3).Lurah/Camat.

### 3. Memeriksa proses kepemilikan

Secara hukum tanah-tanah yang belum bersertifikat tidak dapat di katakan hak milik dari orang yang menguasainya. Tanah tersebut akan menjadi hak milik jika telah memiliki sertifikat hak milik (sertifikat hak guna bangunan untuk tanah dengan hak guna bangunan). Orang yang menguasai tanah yang belum bersertifikat tersebut hanya menguasai tanahnya, dan dokumen-dokumen yang tersedia pada orang yang menguasai tanah itu merupakan dokumen yang membuktikan penguasaan atas tanahnya (bukan dokumen yang membuktikan kepemilikan). Untuk eningkatkan status dari penguasaan menjadi kepemilikan, harus di tempuh jalan sertifikat dengan mengajukan permohonan hak milik atas tanah ke kantor pertanahan setempat. Dengan d keluarkan sertifikat hak milik atas tanah,maka tanah, tanah tersebut telah sah menjadi milik si pemegang hak (dan bukan lagi hak menguasai).

Untuk memeriksa tanah yang belum bersertifikat tersebut adalah benar di kuasai oleh pihak yang mengklaimnya, maka pertama-tama perlu di periksa surat pengakuan hak yang di keluarkan oleh kantor Kepala Desa/Lurah.<sup>8</sup>

Akan tetapi satu hal perlu di pertimbangan bahwa penyelesaian dengan cara melalui lembaga peradilan umum ini,memakan waktu yang sangat lama.

Sebenarnya di kemukakan oleh Zulfahmi, bahwa penyelesaian harus sengketa di pengadilan di prediksi harus mengorbankan banyak hal seperti:

---

<sup>8</sup>Asli Ginting, Majelis *Hakim Pengadilan Negeri Makaassar*, Wawancara, Pada Tanggal 5 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Makassar.

- a. Waktu yang relative lama, jika pihak kalah tidak puas dengan putusan pengadilan,dalam hal ini dapat menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi (PT), pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Penijauan Kempali (PK);
- b. Biaya yang tidak terukur, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan terikat oleh prosedur penyelesaian yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang sehingga biaya menjadi tidak terprediksi.
- c. Putusan pengadilan sering kali tidak dapat lasung di eksekusi
- d. Sering kali putusan pengadilan di warnai campur tangan pihak lain yang bersifat non-yuridis yang mengakibatkan pengadilan terkadang di ragukan sebagai benteng terakhir untuk menemukan keadilan ,dan dalam pengadilan keputusan,dan dalam pengambilan keputusan terkadang pertimbangan non-yuridis menjadi dominan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan hakim dalam menangani kesulitan dalam pemeriksaan setempat adalah dengan mencari riwayat tanah Pada dasarnya surat keterangan riwaya tanah merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan hokum antara penggarap dengan tanah yang di garapnya, dengan beda kasus Memanggil pemilik awal dari tanah yang

---

<sup>9</sup>Zulfahmi, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*, Wawancara di Pengadilan Negeri,Pada Tanggal 8 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Makassar.

di sengketahkan dan memanggil pemilik akhir yg membeli tanah, dan memeriksa proses kepemilikan dengan melihat sertifikat tanah yang dimiliki pemiliknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Urgensi pemeriksaan setempat sebagai alat bukti terhadap sengketa tanah dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

Pemeriksaan setempat bertujuan untuk melakukan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut. Hal ini penting untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan.

Secara konseptual, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, di pindahkan atau dilakukan di tempat lain, yang di tempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*).

2. Kesulitan yang dihadapi hakim dalam pemeriksaan setempat diantaranya, masalah personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat, tanpa melibatkan saksi Ahli, masalah keamanan, dan sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara. Selain itu hakim pun menemukan kendala dari segi yuridis. Salah satunya adalah tidak adanya redaksi hukum yang jelas baik itu

berupa perintah / paksaan telah menjadi penyebab utama sehingga tidak dilakukannya kegiatan peninjauan setempat.

3. Apabila Hakim menjumpai kesulitan ataupun kendala dalam praktek maka harus mencari pemecahan masalah dengan melihat tata cara pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR serta Pasal 180 RbG. upaya yang dilakukan hakim dalam menangani kesulitan dalam pemeriksaan setempat adalah dengan mencari riwayat tanah Pada dasarnya surat keterangan riwayat tanah merupakan bukti bahwa telah terjadi hubungan hukum antara penggarap dengan tanah yang di garapnya, dengan beda kasus Memanggil pemilik awal dari tanah yang di sengketahkan dan memanggil pemilik akhir yg membeli tanah, dan memeriksa proses kepemilikan dengan melihat sertifikat tanah yang dimiliki pemiliknya.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Karena ada perbedaan dalam teori dan prakteknya tentang penuangan perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut dengan ketentuan hukum acara yang telah digariskan dalam ketentuan Undang-Undang, maka sebaiknya para pembentuk Undang-Undang ataupun pimpinan Mahkamah Agung membuat suatu Surat Edaran yang memberikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan setempat tersebut.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sebagai suatu peraturan internal bagi hakim perlu direvisi segera oleh MA dikarenakan terdapat suatu kesalahan dalam



menyebutkan peraturan lain yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat. Dalam surat edaran ini, disebutkan bahwa hakim perlu memperhatikan tentang petunjuk MA mengenai biaya pemeriksaan setempat yaitu SEMA No. 5 tahun 1999 poin 8, setelah penyusun melakukan riset SEMA tersebut tidak mengatur ketentuan mengenai biaya pemeriksaan setempat, melainkan diatur dalam SEMA No. 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi poin 8 yang secara jelas mengatur ketentuan mengenai biaya pemeriksaan setempat.

3. Hendaknya hakim sebagai pemberi keputusan tentang kasus di pengadilan tidak boleh mempermasalahkan keandalan-keandala dan kesulitan yang dihadapi dalam memeriksa semua perkara.
4. Cara penyelesaian sengketa pertanahan disarankan dilakukan dalam dua model, yaitu pertama, harus dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya . Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai.
5. Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan para pihak yang bersengketa yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas faktor waktu, biaya dan efisensi, maka pilihan arbitrase dapat menjadi satu solusi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Agil Husen, *Hukum Islam dan Pluralitas*, Jakarta: Pena Madia, 2004.
- Almansyur, Fauzan dan Junaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Black, Sc Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Fourth Edition*, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1997), holten, Algemeen Deel, h.114. Dikutip juga oleh Sudikno Mertokusumo,
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Esterberg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986
- Harahap, M. Yahya, *.Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hermawan, Mashudi, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya: UM Surabaya, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mulyadi, Lilik, *.Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, 1993/1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1975.

- Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Suparman, Eman, *Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Huku*, Jakarta: UII Pres, 1984.
- Soepomo, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sugiono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Alfabeta, 2011.
- Suparmono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Pustaka Peradilan Jilid VIII, (Jakarta: Penerbit Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1995).
- Reglemen Indonesia yang Dibaharui S.1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M.Karjadi, Pasal 165
- Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No.44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, ....., Pasal 173
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, SEMA No.10 Tahun 2010.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

<http://triwantoselalu.blogspot.co.id/2009/06/sistem-peradilan-pidana.html>



## **RIWAYAT HIDUP**



**Rahmat Bunyadri lahir di Merauke pada tanggal 13 Februari 1991. Anak pertama dari 2 bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan H. Bunyamin dan Hj. Adriana. Penulis menempuh pendidikan di sekolah di SD Negeri 2 Merauke pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2004 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Annajah Yamrah Merauke dan tamat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Model Makassar dan tamat pada tahun 2010.**

**Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) Fakultas Syariah dan Hukum program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.**